

Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Denny Handaroe Sasongko

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

*E-mail: *blendongsadewano.5@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi transparansi, akuntabilitas, reponsibilitas, responsivitas, pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diarahkan pada latar individu secara holistik (utuh) berupa kata-kata dan gambar. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* pemilihan informan yang benar-benar mengerti tentang informasi objek penelitian dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang berkompeten dan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan cukup berhasil dilihat dari aspek transparansi publik dapat mengakses dengan mudah pertanggungjawaban pengelolaan dana desa melalui media informasi yang ada baik laman desa maupun infografik APBDes Desa Dermaji. Aspek akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban yang telah dilakukan Pemerintah Desa Dermaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. Aspek reponsibilitas, pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji dengan menetapkan standar kompetensi serta Kepala Desa yang berkompeten dalam pengelolaan pembangunan desa serta kepatuhan pada aturan yang telah ditetapkan. Aspek responsivitas, daya tanggap kebutuhan publik pada Pemerintah Desa Dermaji mampu membangun sinergisitas antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pengelolaan Dana Desa.

Abstrack

This study aims to determine the implementation of transparency, accountability, responsibility, responsiveness, management of village funds in the Government of Dermaji Village, Lumbir District, Banyumas Regency in 2019. This study uses descriptive qualitative methods as a research procedure that produces descriptive data that is directed at an individual background holistically (whole) in the form of words and images. The selection of informants uses purposive sampling techniques the selection of informants who truly understands the information of the research object and the informant can be trusted as a competent source of data and to obtain data using interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses an interactive analysis. The results of the study showed that it was quite successful from the aspect of public transparency that could easily access accountability in the management of village funds through existing information media both the village page and the Dermaji Village APBD infographic. Accountability aspect, the accountability mechanism that has been carried out by the Village Government of Dermaji is in accordance with the provisions that apply both vertically and horizontally. The aspect of responsibility, the management of village funds in the Dermaji Village Government by setting competency standards as well as the Village Head who is competent in the management of village development and compliance with established rules. Aspect of responsiveness, responsiveness of public needs in the Village Government Dermaji able to build synergy between the village government and the community.

Keywords: *Good Governance*, Village Fund Management.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan akan menemukan titik terang jika semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut terjalin komunikasi dua arah, koordinasi, partisipasi, serta kolaborasi dari para pemangku kepentingan. Rencana strategi implementasi kebijakan pun seharusnya mampu memperhatikan berbagai pihak yang terlibat dan fokus sasaran. Secara kelembagaan faktor yang memiliki pengaruh dalam implentasi kebijakan adalah kepemimpinan dengan visi yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan program (Ansell, 2017:467). Sedangkan untuk kelompok sasaran harus mamperhatikan bagaimana kondisi masyarakat terhadap respon kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal ini tentunya sangat penting untuk diperhatikan oleh para pelaksana kebijakan untuk meminimalisis kegagalan implementasi kebijakan (Sager and Thomann, 2017:287-288). Isu mengenai rendahnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara bukan hanya terjadi pada tingkat pemerintah pusat, bahkan terjadi juga pada tingkat pemerintah desa. Namun demikian, dalam konteks pemerintah desa yang nota benenya merupakan pemerintahan pada tingkat rendah, justru mendapatkan tingkat kepercayaan paling tinggi dari masyarakat dan pemangku kepentingan (Dwiyanto, 2011: 16-17). Studi yang dilakukan Rosyadi dkk (2015) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa jauh lebih tinggi dari pada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terus berupaya menyelenggarakan pemerintah yang baik dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, di era otonomi ini peran pemerintah desa sangat memberikan pengaruh penting, sebab pemerintah desa mendapatkan tingkat kepercayaan paling tinggi dari masyarakat dan pemangku kepentingan (Dwiyanto, 2011: 16-17). Salah satu aspek yang menarik dalam tata kelola pemerintah desa saat ini yakni pengelolaan dana desa yang merupakan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan, namun yang mendapat transfer dana desa dari pusat yakni 23 Kecamatan dengan jumlah 301 desa. Anggaran dana desa Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 sebesar Rp.200.450.575.000,00. Pada tahun 2017 sebesar Rp.255.734.552,00. Dan pada tahun 2018 sebesar Rp.295.876.047,00. Dari jumlah dana desa yang di transfer pemerintah pusat ke RKUD Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga hal ini harus benar-benar dikawal proses pembangunan desa dengan baik dan sesuai norma dan aturan yang berlaku, tentunya aspek penting yang harus diperhatikan melingkupi transparasi, akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas pengelolaan dana desa untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Anggaran dana desa Kabupaten Banyumas dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Kecamatan Penerima Dana Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2015 dan 2016

No.	Kecamatan	DD 2015	DD 2016
1	Lumbir	Rp.3.009.514.348,00	Rp.6.804.936.136,00
2	Wangon	Rp.3.625.779.632,00	Rp.8.214.488.199,00
3	Jatilawang	Rp.3.289.514.525,00	Rp.7.414.585.505,00
4	Rawalo	Rp.2.700.884.082,00	Rp.6.098.477.451,00
5	Kebasen	Rp.3.576.276.103,00	Rp.8.047.097.755,00
6	Kemranjen	Rp.4.422.418.526,00	Rp 9.896.813.941,00
7	Sumpiuh	Rp.3.285.714.014,00	Rp 7.401.734.512,00
8	Tambak	Rp.3.512.066.051,00	Rp 7.829.978.905,00
9	Somagede	Rp.2.677.292.374,00	Rp 6.018.704.815,00
10	Kalibagor	Rp.3.541.051.615,00	Rp 7.927.990.235,00
11	Banyumas	Rp.3.513.813.246,00	Rp 7.835.886.836,00
12	Patikraja	Rp.3.799.394.755,00	Rp 8.464.408.834,00
13	Purwojati	Rp.2.910.142.228,00	Rp 6.468.920.827,00
14	Ajibarang	Rp.4.529.481.515,00	Rp 10.258.835.029,00
15	Gumelar	Rp.3.029.011.931,00	Rp 6.870.864.956,00
16	Pekuncen	Rp.4.761.628.617,00	Rp 10.706.674.769,00
17	Cilongok	Rp.6.062.674.384,00	Rp 13.757.455.112,00
18	Karanglewas	Rp.3.812.269.547,00	Rp 8.507.943.453,00
19	Kedung Banteng	Rp.4.109.638.109,00	Rp 9.176.321.989,00
20	Baturraden	Rp.3.497.198.422,00	Rp 7.779.705.742,00
21	Sumbang	Rp.5.716.568.040,00	Rp 12.924.275.420,00
22	Kembaran	Rp.4.695.570.652,00	Rp 10.483.307.413,00
23	Sokaraja	Rp.5.213.742.284,00	Rp 11.561.167.167,00
	Jumlah	Rp.89.291.645.000,00	Rp 200.450.575.000,00

Sumber: Dinsospermasdes Banyumas Tahun 2016

Berdasarkan tabel daftar kecamatan penerima dana desa Kabupaten Banyumas tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat bahwa dana desa yang diterima setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas berbeda-beda. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan, bahwa anggaran dana desa pada tahun 2015 setiap desa mendapatkan transfer dana hingga Rp.300.000.000,00 namun untuk tahun 2016 setiap desa di Indonesia mendapat dana desa Rp.200.000.000,00 hingga Rp.800.000.000,00 kemudian tahun 2017 setiap desa di Indonesia mendapat dana desa Rp. 800.000.000,00 dan tahun 2018 setiap desa di Indonesia mendapat dana desa Rp 1.000.000.000,00 sehingga dana transfer dari pusat akan mengalami peningkatan sesuai dengan usulan kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Rendahnya transparansi dan akuntabilitas dana desa di Banyumas masih dijumpai keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban. Artinya ketaatan akan aturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana di desa-desa. Hal ini dapat menghambat pada proses pembangunan desa yang tergantung pada dana APBN yang akan ditransfer jika semua LPJ desa se Kabupaten

Banyumas duah terkumpul dan dilaporkan ke pusat. Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji telah berkerja sama secara optimal dalam pembangunan desa, banyak hal yang telah diraih desa ini dan paling utama yaitu partisipasi masyarakat yang sangat antusias jika dibanding dengan desa yang lainnya. Jika dilihat dari aspek pendidikan, Desa Dermaji merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Banyumas yang memiliki Museum Desa, hal ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan edukasi bagi anak-anak usia dini. Selain itu, Desa Dermaji juga mempunyai beberapa prestasi yang diantaranya mendapatkan penghargaan sebagai Desa Unggulan Pilihan Tempo 2016 untuk kategori Desa Melek Teknologi Informasi (Desa Melek IT). Selain itu, dari sisi kepemimpinan, Kepala Desa Dermaji mendapat penghargaan "*Inspiring Young Leader* (Tokoh Muda yang Menginspirasi Tahun 2014)" dari Beritasatu.com. Dalam ajang Festival Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016 (Festival Destika) yang dilaksanakan di Khalkote Sentani Timur, Jayapura Papua 2016, Desa Dermaji mendapat penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika karena memiliki inisiatif, kreativitas, serta semangat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dengan ini Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan realitas sosial baik sikap, strategi, motivasi tindakan dan lain lain secara komprehensif sehingga dapat menjelaskan secara konseptual dan kontekstual mengapa realitas atau fenomena sosial itu terjadi (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilakukan di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data menggunakan Miles, et.al (2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Dermaji dianalisis berdasarkan aspek *Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Responsivitas*.

Transparansi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian bahwa keterbukaan akses akuntablitas pada Pemerintah Desa Dermaji maka disimpulkan dalam kemudahan akses laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes masyarakat dapat mendapatkannya melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik berupa website sehingga publik dapat dengan mudah mengakses anggaran dana desa. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 menegaskan pertanggungjawaban keuangan desa agar dapat diinformasikan melalui media informasi seperti: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Hal ini

menjadi tanggung jawab pemerintah desa kepada publik dimana studi yang dilakukan Rosyadi dkk (2015) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa jauh lebih tinggi dari pada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji melalui tim PTPKD wajib menyampaikan laporan anggaran dana desa yang terakumulasi dalam APBDes kepada kelembagaan desa, elemen masyarakat desa, kepada pemerintah di atasnya, maupun kepada khalayak umum melalui media informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dapat diketahui bersama. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang menemukan perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Sejalan dengan Koppell (2005: 2) mengungkapkan bahwa transparansi merupakan instrumen penting untuk menilai kinerja organisasi untuk terbuka dalam menyampaikan informasi sehingga mensyaratkan birokrat untuk tunduk pada aturan.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa dokumen pertanggungjawaban APBDes dilaporkan sesuai waktu yang ditentukan, info grafik APBDes dilingkungan desa dan di laman resmi desa sudah diketahui oleh masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan Cunningham & Harris (2000: 159-162) menyatakan bahwa kinerja laporan keuangan yang baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu program mampu mewujudkan akuntabilitas publik. Melalui pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa pentingnya keterbukaan informasi keuangan desa merupakan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan Pemerintah Desa Dermaji karena perangkat desa sudah transparan dalam mengelola dana desadan telah memberikan akses dengan mudah mengenai keuangan desa serta tersedianya media informasi untuk mengaksesnya termasuk pemanfaatan media elektronik melalui laman resmi desa hanya saja masyarakat masih perlu difahamkan melalui sosialisasi.

Akuntabilitas

Pembahasan ini merujuk pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jenis pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji baik secara vertikal dari Kecamatan Lumbir dan Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun secara horizontal dari pihak masyarakat yang diwakili oleh lembaga BPD. Mekanisme akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Dermaji sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari pemerintah Kabupaten Banyumas maupun dari BPD. Mekanisme yang digunakan masing-masing peran pengawas tentu berbeda-beda, seperti Inspektorat Kabupaten berhak menerima laporan pertanggungjawaban dana desa dan memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan membina jalannya kegiatan dana desa.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran lembaga pengawas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa memiliki tugas dan fungsinya stategis. Kegiatan

ini bertujuan mengarahkan pada kesesuaian antara praktik dengan prosedur pertanggungjawaban, sehingga hal ini berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban yang telah dilakukan Pemerintah Desa Dermaji telah sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal serta menjaga komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan maupun masyarakat.

Responsibilitas

Pembahasan responsibilitas pertanggungjawaban dana desa berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya tuntutan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa sangat tinggi, hal ini harus disikapi dengan baik supaya dapat mematuhi aturan yang berlaku serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan perangkat desa. Sejauh ini kompetensi perangkat desa sangat berperan penting karena tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat tinggi. Sejauh perangkat Desa Dermaji sudah memenuhi kualifikasi syarat perangkat desa yang profesional berdasarkan kompetensi dan kapasitasnya. Pemerintah Desa Dermaji telah mematuhi aturan dalam akuntabilitas pengelolaan dana. Pemerintah Desa Dermaji dan masyarakat menunjukkan sikap yang harmonis dan kondusif, sehingga pembangunan desa dapat diwujudkan bersama. Di Indonesia birokrat yang bertanggungjawab seharusnya tidak cukup ikuti perintah, tapi harus menggunakan perintah mereka karena keahlian dibatasi oleh standar profesional dan moral.

Dalam penetapan aparatur tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Sehingga harapan dari masyarakat untuk terselenggaranya pelayanan publik yang optimal dapat terwujud. Standar kompetensi yang banyak digunakan yaitu tingkat pendidikan aparatur dan kepatuhan pada aturan, namun disisi lain ada nilai yang tak kalah penting yaitu nilai etika dan moral seorang aparatur publik, sehingga aktivitas pemerintahan akan lebih kondusif dan lebih bersikap bijak. Kepatuhan pada aturan membutuhkan penekanan pada persyaratan hukum mengenai organisasi perilaku, penggabungan tujuan kebijakan dan program menjadi Undang-undang (Koppell, 2005: 3). Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat Desa Dermaji telah memenuhi standar kompetensi aparatur yang berkompeten karena hal ini menjadi penting dalam menentukan kualifikasi perangkat desa serta ketaatan terhadap aturan dan peran seorang pemimpin yang mampu mengarahkan pada tindakan yang sesuai aturan. Disamping itu, standar kompetensi harus diimbangi dengan nilai-nilai moral lainnya, serta peran kepala desa yang berkompeten dalam pengelolaan pembangunan desa, sehingga terciptanya kondisi yang kondusif antara pemerintah dengan masyarakat karena regulasi yang mengatur dana desa telah dipahami oleh elemen Kelembagaan Desa Dermaji maupun dari masyarakatnya.

Responsivitas

Pembahasan ini berdasarkan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat turut dipengaruhi oleh peran kepala desa. Kemampuan dalam sinergitas antara Kepala Desa, perangkat, mitra desa dan masyarakat agar juga berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Perspektif administrasi publik dalam daya tanggap pemerintah menunjuk pada kecepatan dan kemampuan pemerintah dalam menanggapi tuntutan kebutuhan publik. Mencermati kemampuan pemerintah tentu membutuhkan identifikasi jenis dan jumlah kebutuhan yang dibutuhkan publik dengan pertimbangan skala prioritas hingga pengembangan program-program pelayanan publik. Peran seorang pemimpin harus mampu memberikan stimulus bagi aparatur pemerintah untuk mampu merespon kebutuhan publik demi tercapainya tujuan organisasi publik.

Menurut Koppell (2005: 5) resposivitas merupakan dimensi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan publik. Responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Unsur akuntabilitas ini ditekankan pada pendekatan berorientasi pelanggan yang disarankan oleh reformasi yang bertujuan untuk menciptakan kembali pemerintahan. Tujuan organisasi publik dapat tercapai, jika sumber daya yang ada mampu mengarahkan dan mengakomodir kebutuhan yang diharapkan. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pencapaian tujuan organisasi publik, sebab hal ini menjadi aset yang berharga dalam mmanajemen publik dan mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan. Namun sumber daya keuanganpun tak kalah pentingnya, karena berjalannya pelayanan publik termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.

Tujuan organisasi Pemerintah Desa Dermaji dapat dipahami dengan baik oleh perangkat desa karena sudah mempunyai kompetensi yang mumpuni. Hal penting lainnya yakni peran kepala desa yang mampu mengarahkan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Sorensen (2012) yang menyatakan bahwa kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model untuk mengukur akuntabilitas bentuk kolaborasi pemerintahan, dan untuk menerapkan model ini di studi empiris proses inovasi kolaboratif. Peran kepemimpinan Kepala Desa Dermaji telah mampu mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai visi yang hendak diinginkan bersama. Sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan hal penting untuk mewujudkan kondisi yang harmonis dan kondusif dengan memenuhi kebutuhan masyarakat desa, namun hal ini harus dipertimbangkan dengan kemampuan anggaran yang ada.

KESIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan kegiatan yang penting dalam penyelenggaraan organisasi publik, karena hal ini akan menentukan jalan atau tidaknya suatu organisasi dan sebagai upaya untuk mewujudkan kepercayaan publik. Hal ini menjadi isu penting dalam kegiatan pemerintah desa, termasuk Pemerintah Desa Dermaji, sebab dapat menunjukkan wujud tanggung jawab pemerintah desa dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik melalui aspek pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas telah berhasil dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keberhasilan Pemerintah Desa Dermaji ini dapat dilihat dari implementasi empat prinsip *Good Governance* yaitu :

Transparansi

Berdasarkan pelaporan akuntabilitas pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Dermaji disimpulkan bahwa pentingnya keterbukaan informasi keuangan desa merupakan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan Pemerintah Desa Dermaji karena perangkat desa sudah transparan dalam mengelola dana desa dan telah memberikan akses dengan mudah mengenai keuangan desa serta tersedianya mediainformasiuntukmengaksesnya termasuk pemanfaatan media elektronik melalui laman resmi desa. Hal ini disadari oleh perangkat Desa Dermaji menjadi suatu kewajiban untuk memberikan informasi tentang penggunaan anggaran untuk pembangunan desa serta mengoptimalkan media informasi laman desa maupun media lainnya supaya dapat dipahami oleh masyarakat Desa Dermaji khususnya.

Akuntabilitas

Tim PTPKD yang berasal dari perangkat desa sebagai tim yang mengelola keuangan desa menunjukkan bahwa kinerja organisasi publik dapat dilihat dari pola penjarangan, kompetensi, tanggung jawab yang tinggi, pemahaman konsekuensi baik imbalan maupun hukuman yang melekat pada pekerjaan serta sinergitas antara elemen didalamnya. Tolok ukur kompetensi yang dimiliki perangkat Desa Dermaji serta peran Kepala Desa Dermaji yang berkompeten dalam manajemen publik. Peran lembaga pengawas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan ini mengarahkan pada kesesuaian antara praktik dengan prosedur pertanggungjawaban, sehingga hal ini berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban.

Responsibilitas

Standar kompetensi aparatur menjadi hal penting dalam menentukan aparatur yang diharapkan serta ketaatan terhadap aturan dan peran seorang pemimpin yang mampu mengarahkan pada tindakan yang sesuai aturan. perangkat Desa Dermaji telah memenuhi

standar kompetensi aparatur yang berkompeten karena hal ini menjadi penting dalam menentukan kualifikasi perangkat desa serta ketaatan terhadap aturan dan peran seorang pemimpin yang mampu mengarahkan pada tindakan yang sesuai aturan. Disamping itu, standar kompetensi harus diimbangi dengan nilai-nilai moral lainnya, serta peran kepala desa yang berkompeten dalam pengelolaan pembangunan desa, sehingga terciptanya kondisi yang kondusif antara pemerintah dengan masyarakat karena regulasi yang mengatur dana desa telah dipahami oleh elemen Kelembagaan Desa Dermaji maupun dari masyarakatnya.

Responsivitas

Daya tanggap kebutuhan publik pada Pemerintah Desa Dermaji dibangun dengan adanya komunikasi yang baik melalui musyawarah dan usulan-usulan publik melalui media laman desa serta tujuan Desa Dermaji yang dapat dipahami oleh perangkat desa maupun masyarakat yang diwujudkan melalui program kegiatan desa. Peran kepemimpinan Kepala Desa Dermaji telah mampu mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai visi yang hendak diinginkan bersama. Sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan hal penting untuk mewujudkan kondisi yang harmonis dan kondusif dengan memenuhi kebutuhan masyarakat desa, namun hal ini harus dipertimbangkan dengan kemampuan anggaran yang ada.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka untuk menindaklanjuti hasil penelitian dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

Transparansi

Pemerintah Desa Dermaji perlu untuk meningkatkan kemudahan akses media informasi keuangan desa, sehingga informasi tentang keuangan desa dapat diketahui oleh publik khususnya masyarakat Desa Dermaji yang menjadi sasaran pembangunan desa. Disamping itu, Pemerintah Desa Dermaji harus dapat mensosialisasikan media informasi yang dapat diakses masyarakat khususnya media elektronik secara menyeluruh melalui bekerjasama dengan *stakeholders* terkait, karena hal ini menjadi salah satu kelemahan dari penggunaan media elektronik yang belum dipahami oleh masyarakat Desa Dermaji. Hal penting lainnya, untuk menambah kapasitas dari wawasan Pemerintah Desa Dermaji harus dapat mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang keterbukaan informasi publik tentang transparansi anggaran.

Akuntabilitas

Pemerintah Desa Dermaji perlu adanya peningkatan kapasitas kinerja Pemerintah Desa Dermaji yang optimal dengan mengadakan pelatihan kelembagaan sehingga kebutuhan publik dapat terakomodir dengan baik dan pemahaman konsekuensi pekerjaan harus dapat diketahui oleh perangkat desa selaku penyelenggara pembangunan desa, karena hal ini menjadi rutinitas

dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari aspek wawasan, Pemerintah Desa Dermaji perlu meningkatkan ilmu pengetahuan perangkat desa karena hal ini akan menjadi nilai fundamental dalam penguasaan pengetahuan tentang pengelolaan pemerintahan desa yang baik.

Dalam mekanisme pengawasan, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui OPD terkait harus jelas pembagian tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa Dermaji, karena hal ini menjadi kelemahan dalam pengawasan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam mengawasi pemerintah desa, serta pengetahuan auditor pengawas harus ditingkatkan. Disamping itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan dari lembaga pengawas secara intens karena besarnya anggaran yang harus dikelola oleh desa sehingga dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan serta peningkatan kapasitas pendamping desa supaya tindakan yang dilakukan pemerintah desa dapat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Responsibilitas

Standar kompetensi perangkat Desa Dermaji perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan desa yang terencana, efektif, dan efisien, sebab seiring dengan penyelenggaraan pemerintah desa yang semakin kompleks harus mampu menyesuaikan dengan regulasi pemerintah, supaya tindakan yang dilakukan pemerintah desa tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

Responsivitas

Daya tanggap Pemerintah Desa Dermaji perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan media elektronik laman desa maupun media sosial dengan terus mensosialisasikan media tersebut kepada masyarakat Desa Dermaji pada khususnya, karena hal ini menjadi kelemahan dalam daya tanggap yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Disamping itu, anggaran dana desa perlu ditingkatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan, karena anggaran yang ada belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Desa Dermaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Christopher (2017) *Improving policy implementation through collaborative policymaking*. Policy & Politics, 45 (3) , 467–86, Policy Press.
- Cunningham, G.M. & Harris, J.E. (2001) *A Heuristic Framework for Accountability of Governmental Subunits*, *Public Management Review*, 3, (3/4): 145 – 165.
- Dwiyanto, Agus. (2008) *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koppell, J. G. (2005) *Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of multiple accountabilities disorder*. *Public Administration Review*, 65,(1): 94-108.

- Miles, Mathew B. Michael Huberman, Johnny Saldana. (2014)*Qualitative Data Analisis, Methods Sourcebook* (3rd ed). Sage Publications 2000. *Accountability: An Ever-Expanding Concept?*, *Journal Public Administration*, 78, (3): 555 – 576.
- Rosyadi, Slamet. (2016)*Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Konteks Desentralisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sager, Fritz and Thomann, Eva, (2017)*Multiple streams in member state implementation: politics, problem construction and policy paths in Swiss asylum policy*. *Journal of Public Policy*, 37(3), 287–314. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.